

**LAMPIRAN KE XII PERATURAN BUPATI KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**NOMOR : ... TAHUN 2024**  
**TANGGAL : ... 2024**  
**TENTANG : RENJA PD TAHUN 2025**

# **RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025**

Kadir	Sekdis	Kasubag
		

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas Rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja PD) Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025 dapat diselesaikan. Salawat beserta salam untuk Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya.

Penyusunan Renja PD ini tentunya dengan memperhatikan beberapa hal antara lain hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu, analisis kinerja pelayanan Dinas Perhubungan, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, usulan program dan kegiatan masyarakat, program pemerintah kabupaten, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat, serta skala prioritas dalam rangka pencapaian visi misi Dinas Perhubungan maupun Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

Dalam kesempatan ini tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini. Selanjutnya kami menyadari renja ini masih sangat sederhana dan masih banyak kekurangan. Demi kelancaran Program dan kegiatan Dinas Perhubungan masa yang akan datang, kami berharap adanya saran dan masukan yang sifatnya membangun.

Demikian Renja PD Dinas Perhubungan ini kami buat semoga bermanfaat.

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**



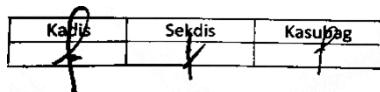
Pembina Tk. I / IV/b

NIP. 19681002 199212 1 001

## DAFTAR ISI

Kadir	Sekdis	Kasubag

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Dokumen Renja PD .....	5
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU</b>	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun	
Lalu dan Capaian Renstra PD .....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	17
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	
Perangkat Daerah .....	21
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	22
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	24
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	25
3.2. Tujuan dan sasaran Renja PD .....	28
3.3. Program dan Kegiatan .....	29
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT</b>	
DAERAH .....	32
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	44



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun ke depan. Yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja PD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah dengan mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPd).
2. Renja PD merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan Program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025.
3. Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada Tahun 2025.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan

Kadir	Sekdis	Kasupag
		

kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan awal RKPD dan Renja Perangkat Daerah, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Pasaman Barat. Disamping itu penyusunan RKPD dan Renja PD juga di integrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.

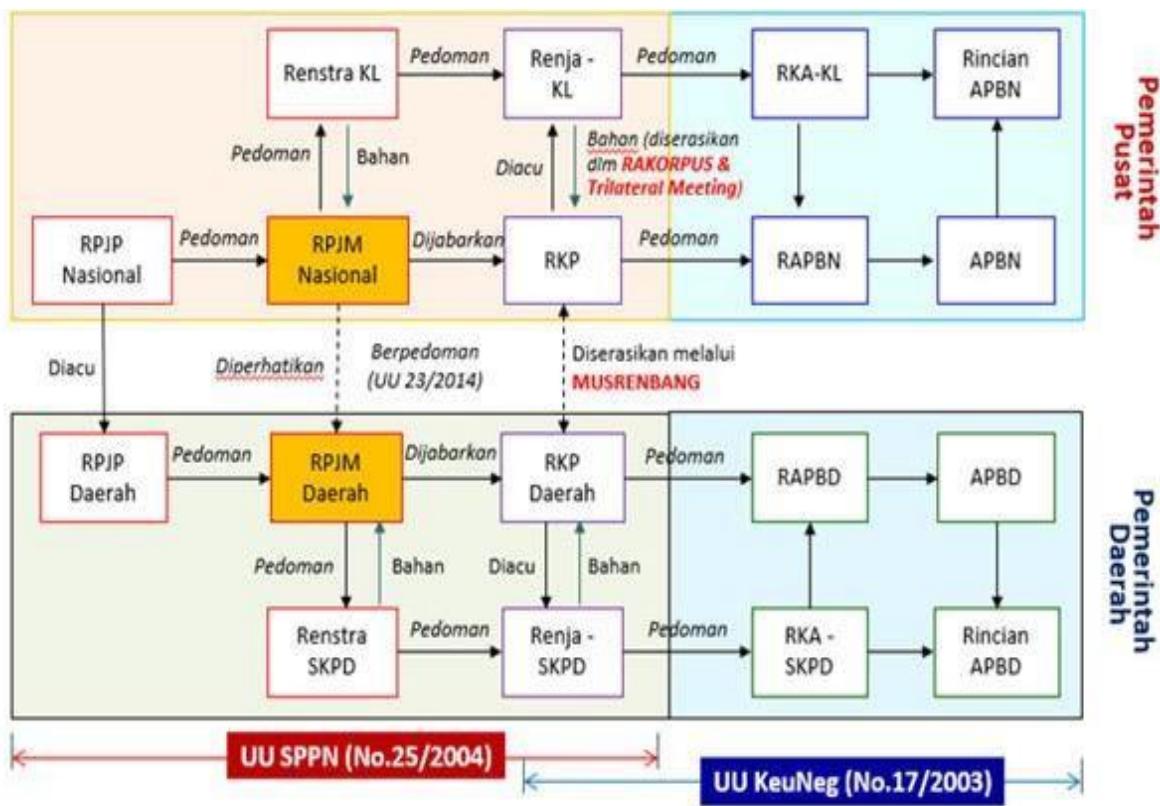
Prioritas Pembangunan pemerintah Pusat untuk saat ini dititik beratkan pada Perhubungan laut, yang mana di Kabupaten Pasaman Barat dibangunnya Pelabuhan Teluk Tapang yang merupakan isu strategis infrastruktur pelayanan Laut pada masa yang akan datang. Status Pelabuhan teluk Tapang merupakan pelabuhan pengumpul yang kewenangannya berada pada Kementerian Perhubungan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Pasaman Barat memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan transportasi dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

Dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Psaman Barat Dinas Perhubungan sesuai dengan Peraturan Menteri perhubungan Nomor 02 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Bidang Perhubungan Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, maka Dinas Perhubungan lebih menitikberatkan pada pelayanan angkutan jalan yaitu penyediaan jaringan angkutan, jaringan prasarana angkutan jalan, fasilitas perlengkapan jalan, pelayanan pengujian kendaraan bermotor, peningkatan sumber daya manusia dan keselamatan.

Kadir	Sekdis	Kasubag
		

Tabel 1. 1 Keterkaitan Dokumen Perencanaan Secara Hierarki



## 1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja PD Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang;
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Kadir	Sekdis	Kasubag

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.49 tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;

Kadis	Sekdis	Kasubag

18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan;
20. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2024;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
25. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
  
26. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

### **1.3. Maksud Dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renja PD Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai acuan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat dalam melaksanakan Program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Perhubungan.

Adapun tujuan disusunnya Renja PD Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025 adalah :

Kadis	Sekdis	Kasubag

1. Sebagai Dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan;
2. Sebagai acuan dalam menyusun jaringan pelayanan angkutan jalan yaitu tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jalan Kab/Kota sesuai dengan Tratalok Kabupaten Pasaman Barat.
3. Untuk menjamin tercapainya jaringan sarana dan prasarana jalan berupa tersedianya halte dan terminal di Kabupaten Pasaman Barat.
4. Untuk menjamin tercapainya fasilitas perlengkapan jalan berupa rambu, marka dan quardrill serta Penerangan Jalan Umum pada Jalan Kabupaten.
5. Untuk menjamin tersedianya sumber daya manusia yang handal di bidang perhubungan.
6. Untuk menjamin meningkatnya pelayanan pengujian kendaraan Bermotor dengan tersedianya alat uji yang berbasis IT.
7. Untuk menjamin keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kabupaten.
8. Untuk menjalin komunikasi aktif antara Pimpinan, komponen perencana, pelaksana dan pengelola perencanaan kegiatan, pelaksanaan sampai ada evaluasi kinerja;
9. Sebagai dokumen acuan/guideline (pedoman) bagi capaian indikator kinerja daerah dalam rentang waktu perencanaan jangka menengah Kepala Daerah terpilih (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 untuk target capaian Visi Misinya.

#### **1.4 Sistematika Dokumen Renja PD**

Sistematika penyusunan Renja PD Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025 sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Dokumen Renja PD

#### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kadir	Sekdis	Kasubag
		

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD/ Renstra Perangkat Daerah

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan sasaran Renja PD

3.3. Program dan Kegiatan

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **BAB IV PENUTUP**

Kadis	Sekdis	Kasubag

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD**  
**TAHUN 2023**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD bertujuan untuk menilai apakah program-program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja PD yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) PD. Melalui evaluasi akan diketahui permasalahan atau kendala - kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan. Adapun informasi yang akan didapatkan melalui evaluasi pelaksanaan Renstra DISHUB sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Penyebab tidak terpenuhinya pencapaian target PD antara lain misalnya:

1. Terlambatnya pengesahan anggaran.
2. Realisasi alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan perencanaan.
3. Perubahan Regulasi .
4. Atau faktor lainnya.

Kadis	Sekdis	Kasupag

Tabel 2.1.1 (T.C 29)  
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian  
 Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Pasaman Barat

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun berjalan 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		100%	90%	100%	80%	80%	100%	100%	100%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									

	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah</b>	100%	<b>97%</b>	100%	99%	99.00	100%	100%	100%
	<b>Administrasi Keuangan</b>	Persentase Operasional Pegawai	100%	<b>97%</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek</b>	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	100%	5 kali	5 kali	100%
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Operasional Kantor</b>	100%	<b>99%</b>	100%	78%	78	100%	100%	100%
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pengadaan Peralatan dan mesin</b>	10 Unit	10 Unit	12 Unit	14 unit	117	0	0	100%
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan jasa Penunjang</b>	100%	<b>89%</b>	100%	91%	91	100%	100%	100%
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang milik Daerah</b>	150 unit	100 unit	150 unit	150 unit	100	150 unit	150 unit	100%
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>Persentase layanan angkutan darat</b>	50%	35%	100%	99%	99	50%	50%	100%

Kadis	Sekdis	Kasubag

	<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen LLAJ</b>	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Penyedia &amp; Pemeliharaan perlengkapan jalan</b>	100 Unit	50 unit	100 unit	100 unit	100	<b>100 unit</b>	<b>100 unit</b>	100%
	<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	<b>Persentase jumlah Terminal tipe C</b>	100%	100%	100%	73%	73	<b>100%</b>	<b>100%</b>	100%
	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	Jumlah Fasilitas Parkir yang ditertibkan	10 Lokasi	0	10 Lokasi	0	0	<b>10 Lokasi</b>	<b>10 Lokasi</b>	100%
	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>Jumlah Kendaraan yang di Uji</b>	4000 Kendaraan	2500 kendaraan	4000 Kendaraan	4000 kendaraan	100	<b>4000 kendaraan</b>	<b>4000 kendaraan</b>	100%
	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kab/Kota</b>	<b>Jumlah Manajemen Lalu Lintas yang dilaksanakan</b>	5 Kali	5 Kali	5 Kali	5 Kali	100	<b>5 kali</b>	<b>5 kali</b>	100%
	<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Penyediaan &amp; Pemeliharaan Bus</b>	11 Bus	11 Bus	<b>11 bus</b>	<b>11 bus</b>	100	<b>11 Bus</b>	<b>11 Bus</b>	100%
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	<b>Jumlah orang/barang Melalui dermaga per tahun</b>	50 ton & 1400 ton,org/tahun	0	0	0	0	<b>1000,1500 ton,org/tahun</b>	<b>1000,1500 ton,org/tahun</b>	100%

Kadis	Sekdis	Kasubag

	<b>Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Pengawasan Kapal</b>	30 unit	20 unit	30 Unit	<b>20 unit</b>	67	<b>30 Unit</b>	<b>30 Unit</b>	100%
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN</b>	<b>Jumlah Org/Barang melalui bandara pertahun</b>	170/700 Kg/Org	00	0	0	0	0	0	100%
	<b>Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter</b>	<b>Jumlah Sarana yang tersedia</b>	48 Kali	48 kali	48 Kali	48 Kali	100	0	0	100%

Kadis	Sekdis	Kasubag

Secara Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang menjadi tanggungjawab organisasi, secara keseluruhan rata – rata capaian kinerja tahun 2023 adalah sebesar 99 %.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 maka Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat juga harus dilakukan evaluasi, karena pada pembuatan Rencana Kerja ini pada bulan Juli 2024, oleh karena itu yang disajikan merupakan perkiraan realisasi Tahun 2024 dan hasil pencapaian Tahun 2023, sebagaimana tersebut dalam tabel 2.2 dibawah ini :

Kadis	Sekdis	Kasubag

Tabel 2.2  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / kegiatan	Indikator Kinerja (outcome) Program/ Kegiatan (output)	Target Capai a n Progra m Renstra Perang kat Daerah Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	
				Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Th 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100%	100%	97.31	97.31	100%	51%	51%

Kadis	Sekdis	Kasubag

	<b>Administrasi Keuangan</b>	Percentase Operasional Pegawai	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>97.29</b>	<b>97.31</b>	<b>100%</b>	54%	54%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	40 org	40 org	40 org	<b>100%</b>	<b>40 org</b>	33 org	33 org
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	67 org	67 org	67 org	<b>100%</b>	<b>67 org</b>	67 org	67 org
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	10 Org	10 Org	10 Org	<b>100%</b>	<b>10 Org</b>	10 org	10 org
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek</b>	<b>100%</b>	<b>3 kali</b>	<b>3 kali</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	5%	5%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	10 Org	10 Org	10 Org	<b>100%</b>	<b>10 Org</b>	1 orang	1 orang
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Percentase Pelaksanaan Operasional Kantor</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	36%	36%

Kadis	Sekdis	Kasubbag

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan alat listrik dan elektronik	150 Pcs	150 Pcs	30 pcs	20%	<b>150 Pcs</b>	0	0%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan ATK dan Matrai	1.000 bh	1.000 bh	450 bh	45%	<b>1.000 bh</b>	0	0%
	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.000 lbr	40.000 lbr	15.000 lbr	38%	<b>40.000 lbr</b>	0	0%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat Koordinasi dan konsultasi yang diikuti	150 Kali	150 Kali	50 kali	33%	<b>150 Kali</b>	0	0%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Peralatan dan mesin	100%	2 unit	2 unit	100%	<b>100%</b>	0	0%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan Peralatan Kantor	12 Unit	2 unit	2 unit	100%	<b>12 Unit</b>	0	0%

Kadis	Sekdis	Kasubag

	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Percentase Penyediaan jasa Penunjang</b>	100%	100%	89.71		100%	50%	50%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Frekuensi penyediaan kebutuhan listrik dan air untuk operasional kantorengadaan Peralatan Kantor	100%	100%	89.71	90%	100%	50%	50%
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang milik Daerah</b>	150 unit	150 unit	100 unit	90%	150 unit	50 unit	50 unit
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas dan Operasional yang dipelihara	64 Unit	64 Unit	50 unit	78%	64 Unit	24 unit	24 unit
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	27 Unit	27 Unit	17 unit	63%	27 Unit	17 unit	17 unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 unit	1 unit

Kadis	Sekdis	Kasubag

<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>Percentase layanan angkutan darat</b>	35%	0	97.99	98%	100%	45%	45%
Penetapan Rencana Induk Jaringan LL AJ Kab/Kota	Jumlah Dokumen LL AJ	1 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	0	0%
Penetapan Rencana Induk Jaringan LL AJ Kab/Kota	Jumlah Dokumen LL AJ	1 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	0	0%
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyedia & Pemeliharaan perlengkapan jalan	100 unit	100%	98.17	98%	100 unit	60 unit	60 unit
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	jumlah pju yang di pelihara	0	252 Unit	180 unit	71%	0%	60 unit	60 unit
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	jumlah perlengkapan jalan yang dipelihara	0	400 Unit	300 unit	75%	0%	0	0%
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	<b>Percentase jumlah Terminal tipe C</b>	100%	80%	0	0	100%	26%	26%
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	jumlah rehabilitas yang dilaksanakan	0	12 bulan	0	0	0%	0	0%

Kadis	Sekdis	Kasubag

	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan Terminal Tipe C	Jumlah Aparatur pengelola terminal	<b>0</b>	6 org	5 org	83%	0%	5 org	5 org
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang ditertibkan	<b>10 Lokasi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 Lokasi</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Fasilitas Parkir yang ditertibkan	<b>10 Lokasi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 Lokasi</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>Jumlah Kendaraan yang di Uji</b>	<b>4000 kendaraan</b>	<b>4000 kendaraan</b>	<b>2500 kendaraan</b>	<b>63%</b>	<b>4000 kendaraan</b>	<b>1000 kendaraan</b>	<b>1000 kendaraan</b>
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	jumlah peningkatan kapasitas sdm	09 org	9 org	6 org	67%	09 org	10 org	10 org
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Pengadaan bukti lulus uji	4.000 buah	1.800 buah	1000 buah	56%	4.000 buah	<b>0</b>	<b>0%</b>
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	jumlah pemeliharaan alat uji	12 Unit	12 Unit	8 unit	66%	12 Unit	<b>0</b>	<b>0%</b>
	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait	100 Kali	20 Kali	15 kali	75%	100 Kali	20 kali	20 kali

Kadis	Sekdis	Kasubag

	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kab/Kota	Jumlah Manajemen Lalu Lintas yang dilaksanakan	100 %	100%	0	0	100 %	42%	42%
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kab/Kota	Jumlah penataan rekayasa lalu lintas	5 Kali	0	0	0	5 Kali	5 kali	5 kali
	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah perlengkapan jalan yang dipasang dan dirawat	12 unit	12 Unit	0	0	12 unit	0	0%
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kab/Kota	Jumlah Forum PERANGKAT DAERAH yang dilaksanakan	5 Kali	0	0	0	5 Kali	0	0%
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan & Pemeliharaan Bus	100%	100%	100%	100%	100%	40%	40%
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bus dan rute pelayanan antar jemput anak sekolah jumlah pengadaan bus	11 Bus	10 unit	8 unit	100%	11 Bus	40%	40%

Kadis	Sekdis	Kasubag

Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Petugas Pengatur Lalu Lintas	35 Org	15 Org	10 org	100%	35 Org	0	0%
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	<b>Jumlah orang/barang Melalui dermaga per tahun</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>96%</b>	<b>96%</b>	<b>100%</b>	<b>30%</b>	<b>30%</b>
<b>Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Pengawasan Kapal</b>	<b>30 Unit</b>	<b>30 Unit</b>	<b>20 unit</b>	<b>67%</b>	<b>30 Unit</b>	<b>10 unit</b>	<b>10 unit</b>
Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah personil Pengawasan lalu Lintas penyebrangan laut	30 Unit	30 Unit	20 unit	67%	30 Unit	10 unit	10 unit
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN</b>	<b>Jumlah Org/Barang melalui bandara pertahun</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>40%</b>	<b>40%</b>

Kadis	Sekdis	Kasubag

	<b>Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter</b>	<b>Jumlah Sarana yang tersedia</b>	<b>48 Kali</b>	48 Kali	<b>48 Kali</b>	100%	<b>48 Kali</b>	8 kali	8 kali
	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	Jumlah Operasional Pesawat	48 Kali	48 Kali	<b>48 Kali</b>	100%	48 Kali	8 kali	8 kali

Kadis	Sekdis	Kasubbag

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat pada tahun anggaran 2023 secara keseluruhan dapat dikatakan berhasil walaupun dalam beberapa hal masih ada yang harus ditingkatkan atau dengan kata lain harus ada penajaman beberapa program serta kegiatan yang akan dilaksanakan, Tujuan, Sasaran dan Program Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat Pada tahun anggaran 2021 - 2026, sesuai Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) yang akan dicapai dapat dilihat pada table 2.2.1 berikut ini:

Tabel 2.2(T-C.30).  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan  
Kabupaten Pasaman Barat

No .	Indikator	SP M/ SN	IK K	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catata n Analis is
				Tahu n 2023 (n-2)	Tahu n 2024 (n-1)	Tahu n 2025 (n)	Tahu n 2026 (n+1)	Tahu n 2023 (n-3)	Tahu n n-1 (2024 )	Tahu n 2025 (n)	Tahu n 2026 (n+1 )	
1	Rasio Konektifitas Kabupaten	v		1,9	2	2,1	2,1	0,79	2	2,1	2,1	
2	Persentase layanan angkutan darat			45%	50%	50%	60%	30%	50%	50%	60%	
3	V/C Ratio di Jalan Kab/Kota			0,5	0,5	0,4	0,4	0,54	0,5	0,4	0,4	
4	% Penurunan TemuanBPK			3%	2%	1%	0%	2%	2%	1%	0%	
5	Nilai SAKIP			70	70	80	80	68,3	70	80	80	

6	Level Maturitas SPIP			3	4	4	4	3	4	4	4	
---	----------------------------	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	--

### 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Beberapa hal yang menjadi Isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dengan pendidikan dan pelatihan atau Bimbingan Teknis dan Pengawasan sebagai pendorong pelaksanaan tugas – tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di berbagai lintas sektoral.
2. Peningkatan pengadaan Infrastruktur fasilitas perlengkapan jalan (marka, rambu, guardraill, APILL, dll) dan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas berupa penerangan jalan umum untuk menciptakan dan wewujudkan standar keselamatan.
3. Peningkatan pengadaan sarana prasarana pendukung pelaksanaan tugas seperti kendaraan operasional, alat komunikasi (HT), senter lalu lintas, helm, rompi, jas hujan dll.
4. Peningkatan sarana Prasarana Pengujian Kendaraan bermotor yang berbasis IT maka akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk optimalisasi pengujian kendaraan bermotor yang laik jalan.
5. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam hal tertib dan disiplin berlalu lintas mengingat saat ini kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan lalu lintas cenderung menurun, tenggang rasa dijalan juga semakin menipis sehingga berdampak pada peningkatan kasus kecelakaan lalu lintas karena faktor manusia. Hal ini sangat penting dalam rangka mewujudkan keselamatan lalu lintas.
6. Peningkatan pelaksanaan koordinasi antar instansi terkait sebagai upaya mewujudkan kesepakatan bersama maupun dalam hal kerjasama mewujudkan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas.
7. Peningkatan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat dan antar lembaga untuk penanganan bidang perhubungan laut terutama dalam penanganan lanjutan pembangunan pelabuhan Teluk Tapang sebagai isu strategis infrastruktur pelayanan laut pada masa yang akan datang.

## **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra Perangkat Daerah**

Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat Mengusulkan rancangan awal renja terdiri dari 6 (enam) Program dan 21 (Dua Puluh Satu) kegiatan, sejak Tahun 2020 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dengan kegiatan Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana Penerangan Jalan telah pindah ke Dinas Perhubungan yang sebelumnya berada pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat, hal ini Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada BAB IV pasal 26 tentang Perlengkapan Jalan disampaikan bahwa Alat Penerangan Jalan termasuk salah satu perlengkapan jalan. Alat Penerangan Jalan diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor 27 Tahun 2018 tentang alat Penerangan Jalan.

Kadis	Sekdis	Kasubag

**Tabel 2.2(T-C.31).**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Dinas Perhubungan**  
**Kabupaten Pasaman Barat**

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Akhir RKPD				
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Dishub			<b>5,246,344,772</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Dishub			<b>5,287,696,708</b>
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Dishub			<b>4,096,273,772</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Dishub			<b>4,251,188,048</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dishub	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Org/Bulan	3,703,978,772	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dishub	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Org/Bulan	3,721,110,448
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dishub	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	298,900,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dishub	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	431,747,600

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dishub	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	93,395,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dishub	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	98,330,000
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Dishub			200,000,000	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Dishub			18,180,000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dishub	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	5 Orang	200,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dishub	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	5 Orang	18,180,000
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Dishub			187,766,000	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Dishub			225,910,040
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dishub	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	20 Paket	1,300,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dishub	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	20 Paket	2,427,440
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dishub	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	12 Paket	36,466,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dishub	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	48,492,600

Kadir	Sekdis	Kasubag

			Kantor yang disediakan							
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dishub	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	150,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dishub	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	174,990,000
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Dishub			<b>200,000,000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Dishub			<b>178,548,000</b>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dishub	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	2 Unit	200,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dishub	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	74 unit	178,548,000
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Dishub			<b>45,000,000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Dishub			<b>47,685,000</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dishub	Jumlah laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dsediakan	12 Laporan	45,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dishub	Jumlah laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dsediakan	12 Laporan	47,685,000

Kadis	Sekdis	Kasubag

	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Dishub			517,305,000	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Dishub			<b>566,185,620</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dishub	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	60 Unit	151,305,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dishub	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	60 Unit	153,475,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dishub	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	100,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dishub	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit	21,180,000
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Dishub	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	1 Unit	250,000,000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Dishub	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	1 Unit	158,108,440
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dishub	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	3 Unit	16,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dishub	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	3 Unit	233,422,180
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	Dishub			3,507,845,000	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	Dishub			<b>1,376,595,890</b>

Kadis	Sekdis	Kasubag

	<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LL AJ Kabupaten/Kota</b>	Dishub			600,000,000	<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LL AJ Kabupaten/Kota</b>	Dishub			5,100,000
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LL AJ Kabupaten/Kota	Dishub	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LL AJ Kabupaten/kOta	1 Dokumen	600,000,000	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LL AJ Kabupaten/Kota	Dishub	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LL AJ Kabupaten/kOta	1 Dokumen	5,100,000
	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	Dishub			868,095,000	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	Dishub			240,747,880
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dishub	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia	150 Unit	700,000,000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dishub	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia	1 unit	9,700,000
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Dishub	Jumlah Perlengkapan Jalan yang tereabilitasi dan terpelihara	150 Unit	168,095,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Dishub	Jumlah Perlengkapan Jalan yang tereabilitasi dan terpelihara	300 unit	231,047,880
	<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	Dishub			457,900,000	<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	Dishub			96,231,010
	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Dishub	Jumlah terminal yang direvitalisasi (fasilitas utama dan penunjang)	1 unit	400,000,000	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Dishub	Jumlah terminal yang direvitalisasi (fasilitas utama dan penunjang)	1 unit	34,307,010

Kadis	Sekdis	Kasubag

	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	Dishub	Jumlah Kebutuhan kompetensi sumber daya manusia pengelola terminal tipe C yang terpenuhi	6 Orang	57,900,000	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	Dishub	Jumlah Kebutuhan kompetensi sumber daya manusia pengelola terminal tipe C yang terpenuhi	6 Orang	61,924,000
	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	Dishub			200,000,000	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	Dishub			<b>6,110,000</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Dishub	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan terbangunnya fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Laporan	200,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Dishub	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan terbangunnya fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Laporan	6,110,000
	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	Dishub			431,850,000	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	Dishub			<b>325,665,000</b>
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dishub	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan	11 Unit	300,000,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dishub	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang tersedia	11 Unit	-

Kadis	Sekdis	Kasubag

			bermotor yang tersedia							
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dishub	Jumlah sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor yang ditingkatkan kapasitasnya	9 orang	71,150,000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dishub	Jumlah sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor yang ditingkatkan kapasitasnya	9 orang	96,850,000
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dishub	Jumlag dokumen Bukti lulus Uji Pengujian berkala kendaraan bermotor	1000 Dokumen	25,700,000	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dishub	Jumlag dokumen Bukti lulus Uji Pengujian berkala kendaraan bermotor	1000 Dokumen	38,500,000
		Dishub				Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Dishub	Jumlah sarana dan Prasarana Pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara	11 unit	161,000,000
	Koordinasi Penyeleggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dishub	Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor	40 Laporan	35,000,000	Koordinasi Penyeleggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dishub	Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor	40 Laporan	29,315,000

Kadir	Sekdis	Kasubag

	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	Dishub			550,000,000	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	Dishub			260,946,000
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dishub	Jumlah laporan pelaksanaan penetaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	10 Laporan	550,000,000	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dishub	Jumlah laporan pelaksanaan penetaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	10 Laporan	225,016,000
		Dishub				Forum Lalu Lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/kota	Dishub	Jumlah laporan Forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota	3 laporan	35,930,000
	<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>	Dishub	<b>Jumlah laporan rekomendasi persetujuan Teknis Andalalin yang ditetapkan</b>	<b>10 Laporan</b>	<b>500,000,000</b>	<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>	Dishub	<b>Jumlah laporan rekomendasi persetujuan Teknis Andalalin yang ditetapkan</b>	<b>10 Laporan</b>	-
	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi	Dishub	Jumlah persetujuan Dokumen Dokumen Teknis	10 Unit	500,000,000	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi	Dishub	Jumlah persetujuan Dokumen Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan	10 Unit	-

Kadis	Sekdis	Kasubag

	Persetujuan Teknis Andalalin		Andalalin yang ditetapkan			Persetujuan Teknis Andalalin				
	<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Dishub			400,000,000	<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Dishub		441,796,000	
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dishub	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk jasa angkutan orang dan/atau Barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten kota yang tersedia	10 Unit	400,000,000	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dishub	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk jasa angkutan orang dan/atau Barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten kota yang tersedia	10 Unit	441,796,000
	<b>PROGRAM PELAYARAN</b>	Dishub			250,000,000	<b>PROGRAM PELAYARAN</b>	Dishub		98,074,000	
	<b>Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau</b>	Dishub			250,000,000	<b>Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau</b>	Dishub		98,074,000	

Kadis	Sekdis	Kasubag

Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Dishub	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyebrangan	12 Laporan	250,000,000	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Dishub	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyebrangan	12 Laporan	98,074,000
Jumlah				<b>9,504,189,772</b>					<b>6,762,366,598</b>

Kadis	Sekdis	Kasubdik

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program kegiatan bidang perhubungan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 selain program kegiatan rutin pendukung pelaksanaan tugas dan pokok dan fungsi Dinas Perhubungan juga program kegiatan masyarakat yang diusulkan dan menjadi prioritas utama pada Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Tabel 2.4

Program dan Kegiatan Musrenbang yang terakomodir Dalam Renja Tahun 2025

No	Program Kegiatan	Lokasi	Anggaran	Sumber Dana	Ket
1	<b>Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ</b>				
	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota</b>				
	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Nagari Aia Gadang Barat	100.000.000	APBD	

*Hasil Musrenbang Kecamatan*

Tabel 2.5

Program dan Kegiatan DPRD yang terakomodir Dalam Renja Tahun 2025

No	Program Kegiatan	Lokasi	Anggaran	Sumber Dana	Ket
1	<b>Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ</b>				
	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota</b>				

	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Kecamatan Koto Balingka Dan Kecamatan Ranah Batahan, Kab. Pasaman Barat	Rp 200,000,000.00	APBD	
2	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Perumahan Royal Pasaman - Yaptip Jorong Katimaha, nagari Lingkuang Aua, Koto Dalam, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat	Rp 200,000,000.00	APBD	
3	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Sasak, kec sasak ranah pasisie, kab Pasaman Barat, Kab. Pasaman Barat	Rp 300,000,000.00	APBD	
4	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Sasak, Kec Sasak Ranah Pasisie, kab. Pasaman Barat, Kab. Pasaman Barat	Rp 200,000,000.00	APBD	
5	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Kec. Ranah Pasisie, Kab. Pasaman Barat	Rp 150,000,000.00	APBD	
6	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Simpang Tiga Kecamatan Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat , Kab. Pasaman Barat	Rp 200,000,000.00	APBD	
7	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Nagari Kapa Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat	Rp 150,000,000.00	APBD	
8	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Sungai Talang Kecamatan Luhak Nan Duo Kab. Pasaman	Rp 200,000,000.00	APBD	

		Barat, Kab. Pasaman Barat			
9	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Kampung I Mahakarya Kecamatan Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat , Kab. Pasaman Barat	Rp 200,000,000.00	APBD	
10	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Kampung V Mahakarya Kecamatan Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat , Kab. Pasaman Barat	Rp 200,000,000.00	APBD	
11	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Kecamatan Pasaman, Kab. Pasaman Barat	Rp 100,000,000.00	APBD	
12	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Kecamatan Talamau, Kab. Pasaman Barat	Rp 100,000,000.00	APBD	
13	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Nagari Kapa dan Nagari Koto baru, Kab. Pasaman Barat	Rp 75,000,000.00	APBD	
14	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Nagari Kapa dan Nagari koto baru, Kab. Pasaman Barat	Rp 75,000,000.00	APBD	
15	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Nagari Kapa Kec.Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat	Rp 200,000,000.00	APBD	
16	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Kec. Pasaman dan Kec. Talamau, Kab. Pasaman Barat	Rp 100,000,000.00	APBD	

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional**

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat merupakan bagian dari sistem pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan Propinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Pasaman Barat. Oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Perhubungan bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Nasional maupun tingkat Propinsi seperti RPJP Propinsi Sumbar, RPJM Propinsi Sumbar, RKPD Propinsi Sumbar dan tingkat Kabupaten seperti RPJPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006 – 2025, RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026, dan RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025.

Arah kebijakan umum Nasional bidang transportasi darat adalah pengembangan jaringan transportasi jalan primer diarahkan untuk ditingkatkan kemampuan dan daya dukungnya sesuai dengan beban lalu lintas terutama yang melayani dan menghubungkan pusat kegiatan nasional, kegiatan wilayah serta kawasan andalan yang cepat berkembang dan untuk mengantisipasi pengembangan jalan tol bebas hambatan.

Sedangkan arah kebijakan umum Nasional bidang transportasi perkotaan ditujukan untuk menciptakan keseimbangan antara sistem angkutan umum dan pergerakan kendaraan pribadi. Pengembangan sistem angkutan umum dan pergerakan angkutan pribadi dikembangkan secara terencana, terpadu antar berbagai jenis moda transportasi sesuai dengan besaran kota, fungsi kota, dan hierarkhi fungsional kota dengan mempertimbangkan karakteristik dan keunggulan karakteristik moda, perkembangan teknologi, pemakaian energi, lingkungan dan tata ruang.

Program prioritas pembangunan perhubungan darat, yaitu program pembinaan, pengembangan dan pembangunan transportasi perkotaan dengan terciptanya rencana induk angkutan perkotaan, rencana induk sistem informasi lalu lintas perkotaan, penyelenggaraan manajemen dan rekayasa di jalan nasional pada kawasan perkotaan, dan fasilitas konversi BBM serta program gasifikasi angkutan umum perkotaan;

Kadir	Sekdis	Kasupag
		

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan nomor KM.49 tahun 2005 tentang sistem Transportasi Nasional maka perlu adanya tatanan Transfortasi yang terdiri dari semua jaringan dan Moda Transfortasi yang terorganisir secara kesisteman.

Tratanan ( tataran Transportasi Nasional) dalam lingkup Nasional, yang bertujuan membentuk suatu sistem pelayanan jasa Transfortasi yang efektif dann efesien dan berfungsi melayani pemindahan penumpang dan barang antar Simpul atau Kota Nasional (SKN) ke LN atau sebaliknya sedangkan Tratawil (tataran Transfortasi Wilayah) dalam lingkup Propinsi, yang bertujuan membentuk suatu sistem pelayanan jasa transfortasi yang efektif dan efesien dan berfungsi melayani pemindahan penumpang dan barang antar simpul atau kota lokal (SKL) dan dari simpul atau kota lokal ke Propinsi atau Nasional atau Sebaliknya.

Untuk memantapkan perencanaan dan mewujudkan sistem transpotasi yang efektif dan efisien di kabupaten pasaman barat maka perlu dilaksanakan Perencanaan Tatanan Transportasi Lokal (Tatralok).

### **Standar Pelayanan Minimum (SPM)**

Pelaksanaan SPM bidang perhubungan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota,

**Tabel 3,1**

#### **Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perhubungan**

No	Jenis Pelayanan Dasar		Standar Pelayanan Minimal	Nilai	Batas Waktu Pencapaian
			Indikator		
1	Angkutan Jalan	1 Jaringan Pelayanan Angkutan	1 Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk	75%	2025
			2 Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang	60%	2025
		2 Jaringan Prasarana Angkutan	3 Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam	100%	2025

			4 Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam	40%	2025
		3 Fasilitas Perlengkapan Jalan	5 Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan	60%	2025
		4 Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	6 Tersedianya unit pengujian kendara-an bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji	60%	2025
		5 Sumber Daya Manusia	7 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah	50%	2025
			8 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala	100%	2025
			9. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan parkir pada	40%	2025
			10. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan	100%	2025
		6.Keselamatan	11. Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam	100%	2025

Sumber: Peraturan Menteri Perhubungan

### 3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *Outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan – pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran

jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA				
1	Terselenggaranya Sistem Pelayanan Transportasi Yang dapat mengembangkan konektifitas wilayah	Meningkatnya konektifitas angkutan umum dan konektifitas jalan	Persentase layanan angkutan darat	40%	45%	50%	50%	60%
			Rasio Konektifitas Kabupaten	1.8	1.9	2	2.1	2.1
			V/C Ratio di Jalan Kab/Kota	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4
2	Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	% Penurunan Temuan BPK	4%	3%	2%	1%	0%
			Nilai SAKIP	70	70	70	80	80
			Level Maturitas SPIP	3	3	3	4	4
			Indek Kepuasan Masyarakat	-	-	90%	90%	90%

### 3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah himpunan dari beberapa kegiatan yang nyata, terpadu dan sistematis yang akan dilaksanakan oleh elemen – elemen yang terdapat dan menjadi bagian dari suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam penyusunan program tersebut ada beberapa kriteria yang ditetapkan antara lain :

1. Memperhatikan tugas pokok dari masing – masing bidang.
2. Memperhatikan Program Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Pusat.

3. Mempertimbangkan hasil evaluasi program dan kegiatan tahun – tahun sebelumnya, saat ini dan yang akan datang.
4. Memperhatikan skala prioritas dalam mendukung pencapaian visi misi baik Dinas Perhubungan maupun Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Rencana kerja Dinas Perhubungan untuk Tahun 2023 dalam mewujudkan tujuan dan sasaran ditindaklanjuti dengan Tiga (3) program, sebelas (11) kegiatan dan Dua puluh dua (22) Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Program dan kegiatan Non Urusan
  1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
    - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
      - c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD
    - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      - a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang – undangan.
    - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
      - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
      - b. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor
      - c. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan.
    - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
    - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik.
    - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.
      - b. Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya
- 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan (LLAJ)
  - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota
    - a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota

Kadir	Sekdis	Kasubag
		

- b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan.
- Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
  - a. Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
- Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
  - a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
  - b. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
  - c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
  - d. Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
- Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kab/kota.
  - a. Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kab/kota.
  - b. Pengendalian dan pengawasan ketersediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kab/kota.

### 3. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

- Penempatan Lintas Penyebrangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk kapal yang melayani Penyebrangan dalam Daerah Kab/kota.
  - a. Pengendalian dan pengawasan jaringan lintas penyebrangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyebrangan dalam dalam Kab/kota.

Kadis	Sekdis	Kasubag

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam Rangka pelaksanaan Rencana Startegis di Tahun ke enam Dinas Perhubungan telah menyusun Program dan kegiatan pada Tahun 2025 dan perkiraan maju Tahun 2025 secara rinci dengan pendanaan terdiri dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD ) Propinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi (APBD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025. Rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2025 dan perkiraan maju Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Kadis	Sekdis	Kasubag

Tabel 4.1

## RENCANA KERJA PD

KAB. PASAMAN BARAT

TAHUN 2025

No	Kode		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelomp ok Sasaran	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Dinas Perhubungan		6.762.366.598,00							11.505.000.000,0 0	
	2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		6.762.366.598,00							11.505.000.000,0 0	
	2	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		6.762.366.598,00							11.505.000.000,0 0	
145	2	15	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional	100%	5.287.696.708,00				100%	6.430.000.000,00	

Kadis	Sekdis	Kasubdg

					DAERAH KABUPATEN/KOTA	perangkat daerah									
	2	15	01	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Operasional Pegawai	100%	4.251.188.048,00		DISH UB		100%	5.500.000.000,00	
	2	15	01	2.0	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/b ulan	3.721.110.448,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	DISH UB		33 Orang /bulan	5.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.0	00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokume n	431.747.600,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	DISH UB		12 Doku men	350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.0	00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									

Kadis	Sekdis	Kasubag

						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	98.330.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DISH UB		12 Dokumen	150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek	5kali	18.180.000,00		DISH UB		5kali	50.000.000,00	
	2	15	01	2.0	00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	18.180.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DISH UB		10 Orang	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Operasional Kantor	100%	225.910.040,00		DISH UB		100%	270.000.000,00	

Kadis	Sekdis	Kasubag

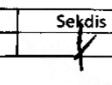
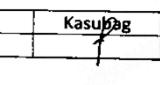
	2	15	01	2.0	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	2.427.440,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DISH UB		20 Paket	20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.0	00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	48.492.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DISH UB		12 Paket	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.0	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										

Kadis	Sekdis	Kasubag

						Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	174.990.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DISH UB		100 Laporan	200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2	15	01	2.0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Peralatan dan mesin	10unit	178.548.000,00		DISH UB		10unit	100.000.000,00			
	2	15	01	2.0	00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	74 Unit	178.548.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DISH UB		20 Unit	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2	15	01	2.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa Penunjang	100%	47.685.000,00		DISH UB		100%	60.000.000,00			
	2	15	01	2.0	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											

Kadis	Sekdis	Kasubag

					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	47.685.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DISH UB		12 Laporan	60.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	150 unit	566.185.620,00		DISH UB		150unit	450.000.000,00	
	2	15	01	2.0 9 00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	60 Unit	153.475.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DISH UB		60 Unit	200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

Kadir	Sekdis	Kasubdg
		

	2	15	01	2.0 9	00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit	21.180.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DISH UB		25 Unit	25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.0 9	00 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya										
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	158.108.440,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DISH UB		1 Unit	200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.0 9	00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	3 Unit	233.422.180,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DISH UB		3 Unit	25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	

Kadis	Sekdis	Kasubag

146	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase layanan angkutan darat	100%	1.376.595.890,00					100%	4.875.000.000,00		
	2	15	02	2.0	1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LL AJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen LL AJ	Jumlah Dokumen LL AJ	5.100.000,00			DISH UB	1dokumen	600.000.000,00			
	2	15	02	2.0	00	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LL AJ Kabupaten/Kota											
						Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LL AJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5.100.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DISH UB		1 Dokumen	600.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2	15	02	2.0	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	200 Unit	240.747.880,00			DISH UB	100unit	1.250.000.000,00			
	2	15	02	2.0	00	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota											

Kadis	Sekdis	Kasubag

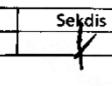
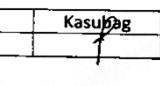
						Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Ko ta yang Tersedia	1 Unit	9.700.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	MAS YARA KAT PASA MAN BAR AT		300 Unit	1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.0	00	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan									
						Jumlah Perlengkapan Jalan yang Tereabilitasi dan Terpelihara	300 Unit	231.047.880,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	MAS YARA KAT PASA MAN BAR AT		20 Unit	250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.0	3	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	1 Unit	96.231.010,00		MAS YARA KAT PASA MN BAR AT	100%	550.000.000,00		
	2	15	02	2.0	00	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)									

Kadis	Sekdis	Kasubag

						Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	1 Unit	0,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DISH UB		1 Unit	200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.0	00	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C									
						Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.	6 Orang	61.924.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DISH UB		10 Orang	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.0	00	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)									
						Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi	1 Unit	34.307.010,00	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkungan Aua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DISH UB		5 Unit	250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

Kadis	Sekdis	Kasubag

						dan terpelihara									
	2	15	02	2.0	4	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang ditertibkan	10 lokassi	6.110.000,00			DISH UB		10loka si	500.000.000,00
	2	15	02	2.0	00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota									
						Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggar aan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Ko ta	10 Laporan	6.110.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	DISH UB		10 Lapor an	500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.0	5	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan yang di Uji	4000 Kendara an	325.665.000,00			DISH UB		4000k endar aan	475.000.000,00

Kadir	Sekdis	Kasubag
		

	2	15	02	2.0	00	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor										
						Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	9 Orang	96.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DISH UB		15 Orang	15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.0	00	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor										
						Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1000 Dokumen	38.500.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DISH UB		1000 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.0	00	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor										

Kadis	Sekdis	Kasubag

						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	11 Unit	161.000.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	DISH UB		11 Unit	150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.0 5	00 08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									
						Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggar aan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	40 Laporan	29.315.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	DISH UB		40 Lapor an	60.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.0 6	00	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Manajemen Lalu Lintas yang dilaksanakan	3 kali	260.946.000,00		DISH UB		5 kali	500.000.000,00	
	2	15	02	2.0 6	00 15	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota									

Kadis	Sekdis	Kasubag

					Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3 Laporan	35.930.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DISH UB	5 Laporan	150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.0 6	00 17	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota							
					Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	10 Laporan	225.016.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DISH UB	50 Laporan	350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

Kadis	Sekdis	Kasubbag

	2	15	02	2.0 9	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota yang tersedia	11 Bus	441.796.000,00			DISH UB		11bus	700.000.000,00		
	2	15	02	2.0 9	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											
					Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 Unit	441.796.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DISH UB		50 Unit	700.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		

Kadis	Sekdis	Kasubag

147	2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	12 Laporan	98.074.000,00					12 Laporan	200.000.000,00				
	2	15	03	2.1	3	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	12 Laporan	98.074.000,00			DISH UB		12 Laporan	200.000.000,00				
	2	15	03	2.1	00	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan													
						Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	98.074.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	DISH UB		12 Laporan	200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN			

Kadis	Sekdis	Kasubag

Kadis	Sekdis	Kasubag
X	X	X

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renja PD Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat yang didalamnya mencakup penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas yang disusun secara tahunan berdasarkan Renstra digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang perhubungan,

Penyusunan Renja PD ini diharapkan agar Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat serta seluruh aparat dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil. Keberhasilan pelaksanaan Renja Tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat serta peran aktif *stakeholder* terkait.

Simpang Empat,                    Juli 2023  
Bupati Pasaman Barat

**HAMSUARDI, S.Ag**

Kadir	Sekdis	Kasubag
		